

STRATEGI MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Maria M Dimun

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha

Jhon Brema Barus

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras memerangi korupsi dengan berbagai cara. KPK sebagai lembaga independen yang secara khusus menangani korupsi, serta melakukan pencegahan dari tindak korupsi. Tapi di sisi lain, usaha aksi yang dilakukan KPK membutuhkan banyak biaya. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat dan negara. Lawan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan jika hanya salah satu pihak maka upaya pemberantasan korupsi akan lemah, hal itu bisa menjadi penghambat bagi upaya untuk melawan korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan, Pejabat publik, Korupsi.

Abstract

Corruption or rasuah is the act of public officials, both politicians and civil servants, as well as other parties involved in that act who improperly and illegally abuse the public trust that is empowered to them to gain unilateral benefit. by law, mistakenly using his power to gain advantage for himself or for others, contrary to the duties and rights of others. The Indonesian government has gone to great lengths to fight corruption in various ways. KPK as an independent institution that specifically deals with corruption, and takes steps to prevent acts of corruption. But on the other hand, the action undertaken by the KPK requires a lot of money. Not to mention if it is calculated from the impact on the life of society and the country. the fight against corruption is the responsibility of all components of the state and if only one party then efforts to eradicate corruption will be weak, it can be an obstacle to efforts to fight corruption

Key Words: Education, Public Officials, Corruption.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dikutip dari *Say No to Korupsi* (2012) karya Juni Sjafrin Jahja, kata korupsi dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua *corrumpere*. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris *corruption* dan *corrupt*, dalam bahasa Perancis *corruption* dan dalam bahasa Belanda *corruptie* yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia.

Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujudkan dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak, baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Berbagai penelitian maupun studi komprehensif soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat luas telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya, korupsi jelas menimbulkan dampak negatif.

Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan.

Ada berbagai macam persoalan korupsi di Indonesia seperti kasus-kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Nasrudin. Pada 21 April 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olah Raga Wafid Muharam, pejabat perusahaan rekanan Mohammad El Idris, dan perantara Mindo Rosalina Manulang karena diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap menyuap. Penyidik KPK menemukan 3 lembar cek tunai dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp3,2 miliar di lokasi penangkapan. Keesokan harinya, ketiga orang tersebut dijadikan tersangka tindak pidana korupsi suap menyuap terkait dengan pembangunan wisma atlet untuk SEA Games ke-26 di Palembang, Sumatra Selatan. Mohammad El Idris mengaku sebagai manajer pemasaran PT Duta Graha Indah, perusahaan yang menjalankan proyek pembangunan wisma atlet tersebut, dan juru bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa cek yang diterima Wafid Muharam tersebut merupakan uang balas jasa dari PT DGI karena telah memenangi tender proyek itu.

Kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah

pengusaha Made Oka Masagung, Keponakan Setya Novanto yakni Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membongkar berbagai modus rasuah yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Alex membuka modus-modus tindak pidana korupsi di BPD ini dalam rangka mengingatkan supaya perbankan milik daerah bisa dioptimalkan untuk pembangunan di daerah. Sumber dana korupsi di BPD di antaranya adalah asuransi baik kredit maupun cash in transit," kata Alex dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10). Kemudian ada kredit fiktif, dan fee agar dana bagi hasil atau dana alokasi khusus untuk daerah tersebut tidak ditempatkan di bank lain. Sebelumnya pada Kamis (1/10), KPK telah mengadakan rapat koordinasi secara daring dengan 27 BPD dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) demi peningkatan peran bank daerah dalam perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini menjelaskan bahwa modus korupsi di BPD umumnya terkait pengadaan barang dan jasa dengan melakukan rekayasa lelang. Ada juga dengan menyunat anggaran atau mark up, praktik arisan proyek pemufakatan jahat dengan rekanan, suap dalam penganggaran dan gratifikasi. "Modus-modus korupsi juga kerap ditemukan dalam perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMD," sambung mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta ini. Yang tidak kalah penting, Alex mengingatkan meningkatnya potensi kerawanan korupsi di BPD saat Pilkada yang sekarang berlangsung. Pasalnya ada lebih dari 30 persen petahana kembali mencalonkan diri dalam Pilkada serentak di 270 daerah. Dijelaskan Alex, tingginya biaya politik yang dibutuhkan calon dan posisi petahana sebagai pemegang saham di BPD, membuka peluang incumbent meminta kontribusi dari bank-bank daerah baik sukarela maupun dengan sedikit tekanan. Alex berpesan, bila modus-modus semacam ini ditemukan, pegawai maupun direksi BPD jangan ragu-ragu segera melaporkannya ke penegak hukum. "Semua pegawai yang bekerja di perbankan harus mempunyai integritas yang tinggi," tegasnya.(antara/jpnn)

Metode

Disini kami menggunakan Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Metode riset ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Longitudinal* (sepanjang waktu) dan *Cross Sectional* (waktu tertentu).

Pembahasan

Mulai dari sistem pendidikan, pendidikan itu harus jujur tidak boleh menyontek, tidak boleh terlambat kita sebagai generasi penerus bangsa harus melatih diri taat aturan. Membangun Pendidikan Moral Segini Mungkin Mengapa banyak pejabat Negara ini yang korupsi? Salah satu jawabannya karena mereka bermoral miskin, bertabiat penjahat dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. oleh karena itu sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. Pembekalan

pendidikan Religi yang Intensif semua agama mengajarkan pada kebaikan. Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan, wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi. Dengan jalan meningkatkan ancaman. Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Cara mengatasi korupsi menurut para ahli

Menanamkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat

Cara mengatasi korupsi menurut para ahli yang pertama adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Tidak hanya pada keluarga saja, namun juga untuk lingkungan sekitar kita. Dengan mengilhami nilai-nilai positif dari kelebihan Demokrasi Pancasila dan juga contoh Demokrasi Pancasila, masyarakat bisa menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka untuk bisa berkata tidak pada korupsi. Tanggung jawab disini tidak hanya dalam mengoposisi tindakan korupsi, tapi yang paling penting adalah mereka dapat bertanggung jawab tentang kejujuran mereka dalam bertindak dan juga berucap.

Membentuk aturan hukum yang kuat

Dengan beberapa fungsi hukum seperti fungsi hukum dalam masyarakat dan fungsi hukum perusahaan, hukum di Indonesia sebenarnya bisa diperbaiki agar bisa mengadili para pelaku dengan sangat adil. Harus ada suatu aturan baku yang digunakan, sebuah aturan yang kokoh dan tidak bisa dijatuhkan. Selain membentuk aturan hukum yang kuat, penegak hukum harus bisa belajar untuk mengadili seseorang dengan seadil mungkin, tidak tebang pilih. Sudah seharusnya mereka tidak bias dalam melakukan tindakan kepada seseorang. Mereka harus independen dan jujur dalam melaksanakan tugas atas nama negara.

Memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini

Selain dari langkah-langkah pencegahan yang nyata lainnya, ada satu yang paling penting, yaitu penanaman pendidikan anti korupsi yang bisa dilakukan sedini mungkin. Para orang tua harus mengedukasi diri mereka terlebih dahulu dengan segala informasi mengenai pendidikan korupsi. Setelah itu, barulah mereka memahami dan akhirnya mengajarkan kepada anak-anak mereka. Keluarga tersebut akhirnya dapat saling mengerti arti dari perilaku anti korupsi dan kelak mereka akan terjauh dari tindakan curang tersebut.

Penyampaian pendidikan moral

Selain dari pendidikan yang formal, seseorang juga harus mendapatkan pendidikan moral. Pendidikan moral sejak dini ini perlu dilakukan untuk menanamkan sebuah nilai empati. Tindakan kita seharusnya tidak memberikan kerugian bagi orang lain. Itulah sebenarnya yang menjadi kunci mengapa para koruptor meraja lela, karena mereka tidak peduli akan efek yang mereka berikan kepada rakyat. Mereka kaya harta namun miskin moral sehingga terbentuklah watak seorang penjahat. Untuk itulah, penanaman nilai moral dalam diri setiap orang merupakan hal yang sangat penting. Salah satu contoh untuk mengaplikasikannya adalah dengan memberikan contoh hukuman yang mendidik bagi siswa SMA kepada anak.

Pendekatan diri dari segi religius

Cara mengatasi korupsi menurut para ahli selanjutnya adalah pendekatan religius. Nilai kebaikan yang diberikan oleh seluruh agama di dunia ini merupakan hal yang sangat penting bagi diri setiap orang. Seseorang tidak akan berani menyakiti orang lain apabila ia memiliki iman yang cukup. Dengan pendekatan religius yang baik, seseorang tidak akan berani melakukan segala bentuk kejahatan karena takut mendapat balasan. Ia akan berusaha di jalan yang baik, untuk mendapatkan hasil yang baik pula.

Kesimpulan

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghinai cita-cita perjuangan bangsa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Daftar Pustaka

- Adi, Y. (2018). Cara Mengatasi Korupsi Menurut Para Ahli di Indonesia. <https://hukamnas.com/cara-mengatasi-korupsi-menurut-para-ahli>.
- Putri, A.S. (2019). Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertianpenyebab-dandampaknya?page=all>.
- Suara.com. (2019). 5 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia dengan Kerugian Negara Fantastis. <https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis?page=all>